

GUBERNUR SULAWESI SELATAN		
Sasaran RPJMD : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani dan Inovatif Indikator : Nilai SAKIP Provinsi		
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN		
KEPALA DINAS		
Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan, dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Indikator : 1. Nilai SAKIP OPD 2. Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik 3. Persentase Temuan Material		
SEKRETARIS		
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel dan Transparan Indikator : 1. Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah 2. Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah 3. Persentase Temuan LHP yang Selesai Ditindaklanjuti		
Kasubbagian Program	Kasubbagian Keuangan	Kasubbagian Umum
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Secara Tepat Waktu dan temuan LHP yang telah ditindaklanjuti	Sasaran Kegiatan: 1. Meningkatnya Kualitas dan Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu 2. Meningkatnya Kualitas dan Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah secara Tepat Waktu	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Kegiatan : Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat Waktu	Kegiatan 1 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Kegiatan : Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu

7 SUB KEGIATAN YANG INDIKATORNYA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 Sub Kegiatan 1 : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan 2 : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sub Kegiatan 3 : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sub Kegiatan 4 : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Sub Kegiatan 5 : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Sub Kegiatan 6 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sub Kegiatan 7 : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Sub Kegiatan	4 SUB KEGIATAN YANG INDIKATORNYA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Sub Kegiatan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan 2 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sub Kegiatan 3 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 SUB KEGIATAN YANG INDIKATORNYA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 Sub Kegiatan 1 : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kegiatan 2 : Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Kegiatan : Terwujudnya Administrasi Umum guna Mendukung Kelancaran Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah 3 SUB KEGIATAN YANG INDIKATORNYA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019
--	---	---

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Sub Kegiatan 2 : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sub Kegiatan 3 : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Kegiatan 3 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kegiatan : Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 SUB KEGIATAN YANG INDIKATORNYA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 Sub Kegiatan 1 : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Sub Kegiatan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Kegiatan 4 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kegiatan : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
--	--	---

		2 SUB KEGIATAN YANG INDIKATORNYA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Sub Kegiatan 2 : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kegiatan 5 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kegiatan : Terpeliharanya Barang Milik Daerah secara Berkelanjutan
--	--	--

		3 SUB KEGIATAN YANG INDIKATORNYA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Sub Kegiatan 2 : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Sub Kegiatan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Sub Kegiatan 3 : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Sub Kegiatan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
--	--	---

GUBERNUR SULAWESI SELATAN	
Sasaran RPJMD	: Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja
Indikator	: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN	
KEPALA DINAS	
Sasaran 2	: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja
Indikator	: Persentase Proyeksi Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)
SEKRETARIS	
Program	: Program Perencanaan Tenaga Kerja
Sasaran Program	: Proyeksi Rencana Tenaga Kerja Provinsi/Kab/Kota dan Meningkatnya Pengetahuan PNS Penyuluh Rencana Tenaga Kerja Mikro di Perusahaan
Indikator	: 1. Persentase Provinsi/Kab/Kota yang Menyusun Perencanaan Tenaga Kerja Makro 2. Persentase Perusahaan yang Menyusun Perencanaan Tenaga Kerja Mikro
Kasubbagian Program	
Sasaran Kegiatan: Terpenuhinya Data Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	
Kegiatan : Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Indikator Kegiatan % Pemenuhan Data Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	
2 SUB KEGIATAN YANG INDIKATORNYA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	
Sub Kegiatan 1 : Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	
Sub Kegiatan 2 : Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Indikator Sub Kegiatan Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro	

GUBERNUR SULAWESI SELATAN	
Sasaran RPJMD	: Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja
Indikator	: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN	
KEPALA DINAS	
Sasaran 3	: Meningkatnya Pembangunan Kawasan dan Kesejahteraan Masyarakat Transmigrasi
Indikator	: Indeks Komposit Perkembangan Kawasan Transmigrasi
BIDANG KETRANSMIGRASIAN	
Program	: Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
Sasaran Program	: Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Transmigrasi
Indikator	: Persentase Jumlah lokasi transmigrasi yang diklarifikasi terhadap tata batas kawasan hutan
Kepala Bidang Ketransmigrasian	
Sasaran Kegiatan: Tersedianya areal kawasan transmigrasi yang bebas dari kawasan hutan dan penguasaan lain serta adanya kepastian letak dan luas yang akan diprogramkan pembangunan transmigrasi	
Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Indikator Kegiatan Data dan Informasi Calon Areal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	
1 SUB KEGIATAN YANG INDIKATORNYA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	
Sub Kegiatan 1: Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi Indikator Sub Kegiatan: Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	

GUBERNUR SULAWESI SELATAN	
Sasaran RPJMD	: Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja
Indikator	: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN	
KEPALA DINAS	
Sasaran 3	: Meningkatnya Pembangunan Kawasan dan Kesejahteraan Masyarakat Transmigrasi
Indikator	: Indeks Komposit Perkembangan Kawasan Transmigrasi
BIDANG KETRANSMIGRASIAN	
Program	: Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Sasaran Program	: Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Transmigrasi
Indikator	: Persentase penempatan transmigrasi
Kepala Bidang Ketransmigrasian	
Sasaran Kegiatan: Tersedianya naskah kesepakatan dan perjanjian bersama antara pemerintah provinsi untuk mendukung persebaran penduduk dan pertumuhan daerah	
Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Kegiatan % Penempatan Transmigrasi	
5 SUB KEGIATAN YANG INDIKATORNYA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	
Sub Kegiatan 1: Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
Sub Kegiatan 2: Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	
Sub Kegiatan 3: Penyuluhan Transmigrasi Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	

GUBERNUR SULAWESI SELATAN	
Sasaran RPJMD	: Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja
Indikator	: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN	
KEPALA DINAS	
Sasaran 3	: Meningkatnya Pembangunan Kawasan dan Kesejahteraan Masyarakat Transmigrasi
Indikator	: Indeks Komposit Perkembangan Kawasan Transmigrasi
BIDANG KETRANSMIGRASIAN	
Program	: Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Sasaran Program	: Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Transmigrasi
Indikator	: Persentase transmigran yang dilatih dapat lebih mandiri
Kepala Bidang Ketransmigrasian	
Sasaran Kegiatan: Ketersediaan data dan Infomrasi kebutuhan sarana dan prasarana an meningkatnya pengetahuan warga transmigrasi	
Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	
Indikator Kegiatan - Ketersediaan Data Sarana dan Prasarana - Persentase Transmigran yang Dilatih untuk dapat lebih Mandiri	
1 SUB KEGIATAN YANG INDIKATORNYA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	
Sub Kegiatan 1: Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	
Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	

GUBERNUR SULAWESI SELATAN	
Sasaran RPJMD	: Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja
Indikator	: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN	
KEPALA DINAS	
Sasaran 4	: Meningkatnya Keterampilan/Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Indikator	: Tingkat produktivitas tenaga kerja
BIDANG PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN	
Program	: Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Sasaran Program	: Terlaksananya Pelatihan Kerja dan Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja
Indikator	: % Pencari Kerja Terlatih yang Mendapatkan Pekerjaan
Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja	Kepala Seksi Kompetensi Tenaga Kerja
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kompetensi Calon Tenaga Kerja yang dilatih oleh instruktur Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang telah disertifikasi
Kegiatan 1: Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kegiatan 1: Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
Indikator Kegiatan Jumlah Pencari Kerja / tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi, pemagangan, kewirausahaan, peningkatan produktivitas, pembinaan kelompok usaha mandiri, pemberdayaan disabilitas, pelatihan pencari kerja, instruktur yang dilatih, dan tersedianya pelayanan operasional UPT BPK	Indikator Kegiatan Jumlah Pencari Kerja / tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi, pemagangan, kewirausahaan, peningkatan produktivitas, pembinaan kelompok usaha mandiri, pemberdayaan disabilitas, pelatihan pencari kerja, instruktur yang dilatih, dan tersedianya pelayanan operasional UPT BPK
1 SUB KEGIATAN YANG INDIKATORNYA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	1 SUB KEGIATAN YANG INDIKATORNYA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019
Sub Kegiatan 1 : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Sub Kegiatan 2 : Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
Indikator Sub Kegiatan - Jumlah Pencaker yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dan pemagangan -Jumlah Pencaker yang mengikuti Pelatihan bagi Pencaker -Jumlah anggota UKM yang mengikuti pelatihan peningkatan produktivitas -Jumlah Kelompok Usaha yang mengikuti pembinaan KUM -Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mengikuti pelatihan -Jumlah pelatihan kewirausahaan	Indikator Sub Kegiatan Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2023

GUBERNUR SULAWESI SELATAN		
Sasaran RPJMD	: Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	
Indikator	: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN		
KEPALA DINAS		
Sasaran 4	: Meningkatnya Keterampilan/Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
Indikator	: Tingkat produktivitas tenaga kerja	
UPT BPK		
Program	: Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
Sasaran Program	: Terlaksananya Pelatihan Kerja dan Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	
Indikator	: % Tenaga Kerja yang Dilatih Berwirausaha dapat Mandiri	
Kasubbagian Tata Usaha	Kepala Seksi Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kepala Seksi Pengukuran Produktivitas dan Bimbingan Konsultasi
Sasaran Kegiatan: Optimalisasi Pelayanan dan Pembinaan UPT Balai Pelatihan Kerja dalam mendukung tenaga kerja yang telah dilatih dapat berwirausaha mandiri	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan agar dapat berwirausaha mandiri dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja/UKM/perusahaan	Sasaran Kegiatan: Tersedianya data dan informasi tingkat produktivitas tenaga kerja di perusahaan/UKM
Kegiatan 1: Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Indikator Kegiatan Jumlah Pencari Kerja / tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi, pemagangan, kewirausaahn, peningkatan produktivitas, pembinaan kelompok usaha mandiri, pemberdayaan disabilitas, pelatihan pencari kerja, instruktur yang dilatih, dan tersedianya pelayanan operasional UPT BPK	Kegiatan 1: Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Indikator Kegiatan Jumlah Pencari Kerja / tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi, pemagangan, kewirausaahn, peningkatan produktivitas, pembinaan kelompok usaha mandiri, pemberdayaan disabilitas, pelatihan pencari kerja, instruktur yang dilatih, dan tersedianya pelayanan operasional UPT BPK	Kegiatan 2: Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi Indikator Kegiatan - Data dan Informasi Pengukuran Produktifitas Tenaga Kerja - Jumlah Anggota UKM yang Mengikuti Bimbingan Konsultasi
2 SUB KEGIATAN YANG INDIKATORNYA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 Sub Kegiatan 2 : Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Indikator Sub Kegiatan Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2023	1 SUB KEGIATAN YANG INDIKATORNYA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 Sub Kegiatan 1 : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Indikator Sub Kegiatan - Jumlah Pencaker yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dan pemagangan -Jumlah Pencaker yang mengikuti Pelatihan bagi Pencaker -Jumlah anggota UKM yang mengikuti pelatihan peningkatan produktivitas -Jumlah Kelompok Usaha yang mengikuti pembinaan KUM -Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mengikuti pelatihan -Jumlah pelatihan kewirausahaan	1 SUB KEGIATAN YANG INDIKATORNYA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 Sub Kegiatan : Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah

GUBERNUR SULAWESI SELATAN	
Sasaran RPJMD	: Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja
Indikator	: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN	
KEPALA DINAS	
Sasaran 5	:Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja di sektor Formal dan Informal
Indikator	: Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja
BIDANG PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN	
Program	: Program Penempatan Tenaga Kerja
Sasaran Program	: Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja
Indikator	: 1. Persentase Pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan 2. Persentase daya serap tenaga kerja
Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	
Kegiatan 1: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Indikator Kegiatan - Data dan Informasi Lowongan Kerja di Perusahaan - Data dan Informasi Pasar dan Bursa Kerja di Kab/Kota	
2 SUB KEGIATAN YANG INDIKATORNYA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	
Sub Kegiatan 1 : Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Indikator Sub Kegiatan Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	
Sub Kegiatan 2 : Job Fair/Bursa Kerja Indikator Sub Kegiatan Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	
Kegiatan 2: Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi Indikator Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Penanganan PMI Terpadu	

1 SUB KEGIATAN YANG INDIKATORNYA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019

Sub Kegiatan 1 :

Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran

Indikator Sub Kegiatan

Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA

Kegiatan 3:

Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Indikator Kegiatan

Data dan Informasi Penggunaan TKA di Kab/Kota

1 SUB KEGIATAN YANG INDIKATORNYA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019

Sub Kegiatan :

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Indikator Sub Kegiatan

Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN		
Sasaran RPJMD	: Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	
Indikator	: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN		
KEPALA DINAS		
Sasaran 6	: Meningkatnya Produktivitas Perusahaan dalam Rangka Terwujudnya Kesejahteraan Pekerja/Buruh	
Indikator	: Persentase Kenaikan Upah (Per Tahun)	
BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL		
Program	: Program Hubungan Industrial	
Sasaran Program	: Meningkatnya Harmonisasi Industrial, Upah, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
Indikator	: 1. Persentase Perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan 2. Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi Peserta Jamsostek	
Kepala Seksi Jaminan Sosial	Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan	Kepala Bidang Hubungan Industrial
Sasaran Kegiatan: Tersedianya data dan informasi pelaksanaan syarat kerja dalam mendukung meningkatnya penerapan peraturan perundang-undangan bidang HI di perusahaan	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya penerapan peraturan perundang-undangan bidang hubungan industrial di perusahaan	Sasaran Kegiatan: Terbitnya Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Meningkatnya pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek
Kegiatan 1: Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota Indikator Kegiatan : - Jumlah Anggota SP/SB yang mengikuti Rapat Koordinasi/Workshop -Data dan Informasi Pelaksanaan Syarat-Syarat Kerja di Perusahaan Kab/Kota	Kegiatan 2 : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Kegiatan : Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial di Perusahaan yang dapat diselesaikan	Kegiatan 3: Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Indikator Kegiatan : - Fasilitasi Dewan Pengupahan dalam Menetapkan Upah Minimum Provinsi - Jumlah Pekerja yang Mengikuti Program Jamsostek
1 SUB KEGIATAN YANG INDIKATORNYA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 Sub Kegiatan 1: Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	2 SUB KEGIATAN YANG INDIKATORNYA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 Sub Kegiatan 1 : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Sub Kegiatan Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	2 SUB KEGIATAN YANG INDIKATORNYA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 Sub Kegiatan 1: Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Penetapan UMP Sub Kegiatan 2: Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Sasaran Kegiatan: Terfasilitasi Tim LKS Tripartit dalam mewujudkan HI yang kondusif		
Kegiatan 2 : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Kegiatan : Fasilitasi Tim LKS Tripartit dalam Mewujudkan Hubungan Industrial yang Kondusif (Pengusaha, Pekerja, Pemerintah)		
2 SUB KEGIATAN YANG INDIKATORNYA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 Sub Kegiatan 2: Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi Indikator Sub Kegiatan Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		

GUBERNUR SULAWESI SELATAN	
Sasaran RPJMD	: Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja
Indikator	: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN	
KEPALA DINAS	
Sasaran 7	: Meningkatnya Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja serta Perlindungan Pekerja/Buruh
Indikator	: Prosentase penanganan kasus kecelakaan kerja
BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	
Program	: Program Pengawasan Ketenagakerjaan
Sasaran Program	: Menurunnya kasus ketenagakerjaan
Indikator	: 1. Persentase Penurunan resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja 2. Persentase Kepatuhan Penerapan Norma Ketenagakerjaan
Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	Kepala Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kepatuhan Penerapan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan Lingkup Provinsi	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan dalam mendukung penurunan resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Indikator Kegiatan - Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan yang Mengikuti Pembinaan - Jumlah Kasus Ketenagakerjaan yang ditangani di perusahaan	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Indikator Kegiatan - Data dan Informasi Objek dan Peralatan K3 Perusahaan yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengujian - Jumlah Tenaga Kerja Perusahaan yang mengikuti Pelatihan Keselamatan dan Kecelakaan Kerja (K3)
2 SUB KEGIATAN YANG INDIKATORNYA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	1 SUB KEGIATAN YANG INDIKATORNYA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019
Sub Kegiatan 1: Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Sub Kegiatan 3: Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3
Sub Kegiatan 2: Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	

GUBERNUR SULAWESI SELATAN		
Sasaran RPJMD	: Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	
Indikator	: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN		
KEPALA DINAS		
Sasaran 7	: Meningkatnya Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja serta Perlindungan Pekerja/Buruh	
Indikator	: Prosentase penanganan kasus kecelakaan kerja	
UPT WILAYAH I,II,III, DAN IV		
Program	: Program Pengawasan Ketenagakerjaan	
Sasaran Program	: Menurunnya kasus ketenagakerjaan	
Indikator	: 1. Persentase Penurunan resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja 2. Meningkatnya kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan	
Kasubbagian Tata Usaha	Kepala Seksi Pemeriksaan Norma Kerja	Kepala Seksi Pemeriksaan Norma K3
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan UPT Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja Wilayah I,II,III, dan IV dalam Mendukung Penurunan Resiko Kecelakaan Kerja/Penyakit Akibat Kerja dan mendukung Kepatuhan Penerapan Norma Ketenagakerjaan	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kepatuhan Penerapan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan Lingkup UPT Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja Wilayah I,II,III, dan IV	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan dalam mendukung penurunan resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di Wilayah I,II,III, dan IV
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Indikator Kegiatan - Jumlah Perusahaan yang diperiksa Wilayah I, II,III,IV - Data dan Informasi Objek Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I, II, III, IV -Kelancaran Pengelolaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Pengawasan UPT Wilayah I,II,III, IV	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Indikator Kegiatan - Jumlah Perusahaan yang diperiksa Wilayah I, II,III,IV - Data dan Informasi Objek Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I, II, III, IV -Kelancaran Pengelolaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Pengawasan UPT Wilayah I,II,III, IV	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Indikator Kegiatan - Jumlah Perusahaan yang diperiksa Wilayah I, II,III,IV - Data dan Informasi Objek Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I, II, III, IV -Kelancaran Pengelolaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Pengawasan UPT Wilayah I,II,III, IV
1 SUB KEGIATAN YANG INDIKATORNYA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 Sub Kegiatan 1: Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	1 SUB KEGIATAN YANG INDIKATORNYA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 Sub Kegiatan 1: Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	1 SUB KEGIATAN YANG INDIKATORNYA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 Sub Kegiatan 1: Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)

RENCANA AKSI TAHUN 2022
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN			PROGRAM					KEGIATAN			
			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN		TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Pemerintahan yang Berorientasi Melayani, Inovatif dan Berkarakter	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Provinsi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengolahan Keuangan Perangkat Daerah	- Nilai SAKIP OPD	Tri I - %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%	Tri I	0	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Tri I	36,38
					Tri II - %			%	Tri II	0			Tri II	33,36
					Tri III - %			%	Tri III	0			Tri III	13,53
					Tri IV 85%			%	Tri IV	100			Tri IV	16,73
				- Persentase ASN nilai SKP kategori baik	Tri I 25 %	- Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik		%	Tri I	25	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	Tri I	23,04
					Tri II 25 %			%	Tri II	25			Tri II	30,87
					Tri III 25 %			%	Tri III	25			Tri III	23,04
					Tri IV 25 %			%	Tri IV	25			Tri IV	23,05
				- Persentase temuan material	Tri I - %	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP (%)		%	Tri I	0	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	Tri I	21,4
					Tri II - %			%	Tri II	0			Tri II	21,4
					Tri III - %			%	Tri III	0			Tri III	35,75
					Tri IV 3%			%	Tri IV	4			Tri IV	21,45
											4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	Tri I	25,00
													Tri II	25,00
													Tri III	25,00
													Tri IV	25,00
											5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tri I	24,96
													Tri II	25,12
													Tri III	24,96
													Tri IV	24,96
											6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Tri I	6,79
													Tri II	16,11
													Tri III	55,27
													Tri IV	21,84
Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Yang Produktif	Mengoptimalkan Penanganan masalah ketenagakerjaan dan transmigrasi	1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) 2. Jumlah Kawasan Transmigrasi yang mencapai status perkembangan mandiri dan berdaya saing	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	- Prosentase Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Tri I 0	Program Perencanaan Tenaga Kerja	- Persentase Provinsi /Kab /Kota yang menyusun Perencanaan Tenaga Kerja Makro	%	Tri I	0	1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Data Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	Tri I	0,00
					Tri II 0			%	Tri II	0			Tri II	0,00
					Tri III 0			%	Tri III	0			Tri III	20,60
					Tri IV 94,11%			%	Tri IV	100			Tri IV	79,40
							- Persentase Perusahaan Yang Menyusun Perencanaan Tenaga Kerja Mikro	%	Tri I	0				
								%	Tri II	0				
								%	Tri III	0				
								%	Tri IV	7				
			Meningkatnya keterampilan / kompetensi tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja	- Tingkat produktifitas tenaga kerja	Tri I 0	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	%	Tri I	0	1 Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja / tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi, pemagangan, kewirausahaan, peningkatan produktivitas, pembinaan kelompok usaha mandiri, pemberdayaan disabilitas, pelatihan pencari kerja	Tri I	37,86
					Tri II 0			%	Tri II	0			Tri II	3,82
					Tri III 0			%	Tri III	0			Tri III	4,23
					Tri IV Rp. 90.664.371			%	Tri IV	75			Tri IV	54,09

[illegible]

[illegible]

Makassar, Januari 2022

Dr. H. TAUTOLO TRS, M.Si

NIP: 19640811 199303 1 006

RENCANA AKSI TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN			PROGRAM					KEGIATAN								
			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN		TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					
Pemerintahan yang Berorientasi Melayani, Inovatif dan Berkarakter	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Provinsi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengolahan Keuangan Perangkat Daerah	- Nilai SAKIP OPD	Tri I	- %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%	Tri I	25	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tri I	49,10				
					Tri II	- %			%	Tri II	25			Tri II	24,77				
					Tri III	- %			%	Tri III	25			Tri III	8,21				
					Tri IV	91%			%	Tri IV	25			Tri IV	17,92				
					- Persentase ASN nilai SKP kategori baik	Tri I			25 %	- Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	%			Tri I	25	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkatat daerah tepat waktu	Tri I	23,67
						Tri II			25 %		%			Tri II	25			Tri II	31,90
						Tri III			25 %		%			Tri III	25			Tri III	23,67
						Tri IV			25 %		%			Tri IV	25			Tri IV	20,77
					- Persentase temuan material	Tri I			- %	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan	%			Tri I	0	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian tepat waktu	Tri I	20,88
						Tri II			- %		%			Tri II	0			Tri II	29,84
						Tri III			- %		%			Tri III	0			Tri III	20,13
						Tri IV			3%		%			Tri IV	3			Tri IV	29,16
				4 Administrasi Umum Perangkat Daerah				Terwujudnya administrasi umum guna mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Tri I		6,07								
									Tri II		22,90								
									Tri III		6,14								
									Tri IV		64,89								
				5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah			Tersedianya kebutuhan barang milik daerah	Tri I	0,00										
								Tri II	21,23										
								Tri III	0,00										
								Tri IV	78,77										
				6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tri I	25,00										
								Tri II	25,00										
								Tri III	25,00										
								Tri IV	25,00										
				7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terpeliharanya barang milik daerah secara berkelanjutan	Tri I	4,29										
								Tri II	25,49										
								Tri III	15,30										
								Tri IV	54,92										
Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Yang Produktif	Mengoptimalkan Penanganan masalah ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) 2. Jumlah Kawasan Transmigrasi yang mencapai status perkembangan mandiri dan berdaya saing	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	Prosentase Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Tri I	0	Program Perencanaan Tenaga Kerja	- Persentase Provinsi /Kab /Kota yang menyusun Perencanaan Tenaga Kerja Makro	%	Tri I	0	1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	% Pemenuhan data perencanaan tenaga kerja provinsi	Tri I	0,00				
					Tri II	0			%	Tri II	0			Tri II	60,52				
					Tri III	0			%	Tri III	0			Tri III	11,34				
					Tri IV	94,57%			%	Tri IV	100			Tri IV	28,15				
					- Persentase Perusahaan Yang Menyusun Perencanaan Tenaga Kerja Mikro						%			Tri I	0				
											%			Tri II	0				
											%			Tri III	0				
											%			Tri IV	7				

			Meningkatnya keterampilan / kompetensi tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja	-	Tingkat produktifitas tenaga kerja	Tri I Tri II Tri III Tri IV	0 0 0 Rp. 93.325.387	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	-	Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	% % % %	Tri I Tri II Tri III Tri IV	0 0 0 75	1	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja / tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi, pemagangan, kewirausahaan, peningkatan produktivitas, pembinaan kelompok usaha mandiri, pemberdayaan disabilitas, pelatihan pencari kerja, instruktur yang dilatih, dan tersedianya pelayanan operasional UPT BPK	Tri I Tri II Tri III Tri IV	24,04 5,31 4,02 66,63
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja disektor formal dan informal		Jumlah penyerapan tenaga kerja	Tri I Tri II Tri III Tri IV	0 0 0 100000 orang	Program Penempatan Tenaga Kerja	-	Persentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri	% % % %	Tri I Tri II Tri III Tri IV	0 0 0 80	2	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	1. Data dan informasi pengukuran produktivitas tenaga kerja, 2. Jumlah anggota UKM yang mengikuti bimbingan konsultasi	Tri I Tri II Tri III Tri IV	0,00 26,25 73,75 0,00
			Meningkatnya produktivitas perusahaan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan pekerja / buruh		Prosentase kenaikan upah	Tri I Tri II Tri III Tri IV	0 0 0 9,0%	Program Hubungan Industrial		Prosentase Pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	% % % %	Tri I Tri II Tri III Tri IV	0 0 0 4,13	1	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Data dan informasi lowongan kerja di perusahaan, 2). Data dan informasi pasar dan bursa kerja di kab/kota	Tri I Tri II Tri III Tri IV	4,54 45,46 4,54 45,46
										Persentase daya serap tenaga kerja (Prioritas)	% % % %	Tri I Tri II Tri III Tri IV	0 0 0 59,09	2	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Meningkatnya Pelayanan Penanganan PMI Terpadu	Tri I Tri II Tri III Tri IV	13,92 20,00 42,60 23,48
														3	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA dan Lokasi Kerja Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Data dan informasi penggunaan TKA di Kab/kota	Tri I Tri II Tri III Tri IV	48,00 2,00 48,00 2,00
										Persentase Perusahaan yang menerapkan peraturan perundang undangan dibidang ketenagakerjaan	% % % %	Tri I Tri II Tri III Tri IV	0 0 0 58	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	1). Jumlah anggota SP/SB yang mengikuti rapat koordinasi/workshop, 2). Data dan informasi pelaksanaan syarat-syarat kerja di perusahaan kab/kota,	Tri I Tri II Tri III Tri IV	2,65 80,26 2,65 14,44
										Besaran pekerja / buruh yang menjadi peserta jamsostek	% % % %	Tri I Tri II Tri III Tri IV	0 0 0 46,81		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	1). Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial di perusahaan yang dapat diselesaikan, 2). Fasilitasi Tim LKS Tripartit dalam mewujudkan hubungan industrial yang kondusif (Pengusaha, Pekerja, Pemerintah)	Tri I Tri II Tri III Tri IV	22,49 24,84 22,22 30,45
														3	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	1). Fasilitasi Dewan Pengupahan dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi, 2). Jumlah pekerja yang mengikuti program jamsostek	Tri I Tri II Tri III Tri IV	16,48 32,40 21,67 29,45

			Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan pekerja / buruh	Prosentase penanganan kasus kecelakaan kerja	Tri I 0 Tri II 0 Tri III 0 Tri IV 19,21%	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Prosentase penurunan resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	% % % %	Tri I 0 Tri II 0 Tri III 0 Tri IV 85	0 0 0 85	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	1) Jumlah perusahaan yang diperiksa Wilayah, I, II, III dan IV. 2) Data dan informasi objek pengawasan ketenagakerjaan Wilayah I, II, III, IV. 3) Kelancaran pengelolaan dan pelaksanaan pemeriksaan pengawasan UPT Wilayah I, II, III, IV. 4) Jumlah pengawas ketenagakerjaan yang mengikuti pembinaan. 5) Jumlah kasus ketenagakerjaan yang ditangani di perusahaan. 6) Data dan informasi objek dan peralatan K3 perusahaan yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. 7) Jumlah tenaga kerja perusahaan yang mengikuti pelatihan keselamatan dan kecelakaan kerja (K3)	Tri I 21,88 Tri II 22,33 Tri III 28,99 Tri IV 26,80	
			Meningkatnya pembangunan kawasan dan kesejahteraan masyarakat transmigrasi	Indeks Komposit Perkembangan Kawasan Transmigrasi	Tri I 0 Tri II 0 Tri III 0 Tri IV 49,30%	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Jumlah lokasi transmigrasi yang diklarifikasi terhadap tata batas kawasan hutan	% % % %	Tri I 0 Tri II 0 Tri III 0 Tri IV 100	0 0 0 100	1 Pencadangan tanah untuk Kawasa Transmigrasi	Data dan informasi calon areal pengembangan kawasan transmigrasi	Tri I 0,00 Tri II 100,00 Tri III 0,00 Tri IV 0,00	
						Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigrasi	% % % %	Tri I 0 Tri II 0 Tri III 0 Tri IV 100	0 0 0 100	1 Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah propinsi	Prosentase penempatan transmigrasi	Tri I 0,00 Tri II 35,42 Tri III 56,39 Tri IV 8,19	
						Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Prosentase transmigran yang dilatih untuk dapat lebih mandiri	% % % %	Tri I 0 Tri II 0 Tri III 0 Tri IV 100	0 0 0 100	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	1). Ketersediaan data sarana dan prasarana. 2) Prosentase transmigran yang dilatih untuk dapat lebih mandiri	Tri I 55,56 Tri II 0,00 Tri III 44,44 Tri IV 0,00	
							Ketersediaan data sarana dan prasarana	% % % %	Tri I 0 Tri II 0 Tri III 0 Tri IV 100	0 0 0 100				

Makassar, 2023

 KEPALA DINAS

ARDILES SANGAP, S. STP., M. Si
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19800324 199810 1 001